



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 000.2.1-23 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah menetapkan Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah dan Pengurus Barang Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Intan Jaya atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah dan Pengurus Barang Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah.../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

24. Peraturan Presiden.../5

24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);

31. Peraturan Bupati.../6

31. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
33. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk pengurus barang pengguna pada perangkat daerah dan pengurus barang pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2026 yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan fungsional umum sebagaimana tersebut dalam lajur 5 pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepadanya diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

sejalan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIRAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR : 000.2.1-23 TAHUN 2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : Penunjukkan Pengurus Barang Pengguna
pada Perangkat Daerah dan Pengurus Barang
Pembantu pada Unit Palaksana Teknis
Daerah Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	RESTI TANDI LEMBANG NIP. 19780801 202421 2 005	V	Sekretariat Daerah	PENGURUS BARANG	
2	YONDI KOGOYA, S.Sos NIP. 19860502 202012 1 005	PENATA MUDA TK. I III/b	Sekretariat DPRD	PENGURUS BARANG	
3	PAULUS KOBEP, SH NIP. 19871125 202012 1 005	PENATA MUDA III/a	Inspektorat Daerah	PENGURUS BARANG	
4	ELISABETH MIGAU NIP. 19940731 202012 2 012	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Pendidikan	PENGURUS BARANG	
5	SUSANA TARA, S.Farm.,Apt NIP. 19910919 201511 2 001	PENATA III/c	Dinas Kesehatan	PENGURUS BARANG	
6	REINALDO RAIKI, ST NIP. 19901117 202012 1 003	PENATA MUDA III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PENGURUS BARANG	
7	FRION MIRIP NIP. 19830109 201505 1 003	PENGATUR II/c	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PENGURUS BARANG	
8	AMOS KOBOGAU NIP. 19810525 201004 1 002	PENGATUR II/c	Dinas Sosial	PENGURUS BARANG	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
9	VALENTINUS ORMIS ZONGGONAU NIP. 19911212 202012 1 008	PENGATUR MUDA TK. I II/b	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PENGURUS BARANG	
10	VALDO REYNALD SESERAY NIP. 19950419 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Ketahanan Pangan	PENGURUS BARANG	
11	ARNOLDUS MAISINI NIP. 19960618 202506 1 004	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Lingkungan Hidup	PENGURUS BARANG	
12	NES TABUNI, A.Md NIP. 19891111 202012 1 009	PENGATUR TK. I II/d	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENGURUS BARANG	
13	MARKUS MIAGONI, ST NIP. 19850711 201104 1 002	PENATA MUDA III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	PENGURUS BARANG	
14	MARTINUS TIGAU NIP. 19901106 201505 1 001	PENGATUR II/c	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PENGURUS BARANG	
15	FREDI MBISIKMBO NIP. 199710042020121004	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perhubungan	PENGURUS BARANG	
16	BENNY ADRIANTO TENDEAN, SE NIP. 19850601 202012 1 002	PENATA MUDA TK. I III/b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PENGURUS BARANG	
17	YOSEPINA PAI NIP. 19920606 202407 2 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PENGURUS BARANG	
18	BERTI DENISIUS RUMAYOMI NIP. 19880412 202012 1 010	PENGATUR MUDA TK. I II/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PENGURUS BARANG	
19	ALBERT FARWAS NIP. 19951129 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PENGURUS BARANG	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
20	YANCE TIGAU NIP. 19920713 201505 1 001	PENGATUR II/c	Dinas Peternakan dan Perikanan	PENGURUS BARANG	
21	LUTER SANI NIP. 19871205 201104 1 001	PENGATUR TK. I II/d	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	PENGURUS BARANG	
22	YETHA NOVITA ADOLINA NUBURI, S.Pt. NIP. 19851114 202012 2 004	PENATA MUDA TK. I III/b	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PENGURUS BARANG	
23	MIANUS YARINAP NIP. 19921226 202012 1 007	PENGATUR MUDA TK. I II/b	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PENGURUS BARANG	
24	SEM BAGAU NIP. 19930304 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	PENGURUS BARANG	
25	ALEX AGIMBAU NIP. 19920809 202407 1 003	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	PENGURUS BARANG	
26	SARTINA SARAMBINI BATFUTU, S.Sos NIP. 19860817 201505 2 001	PENATA MUDA III/a	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PENGURUS BARANG	
27	ELSYE RATTE NIP. 19920204 202407 2 001	PENGATUR MUDA II/a	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	PENGURUS BARANG	
28	JAMES CHRISTIAN NIP. 19870712 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	PENGURUS BARANG	
29	KHALIFATULLAH ARPA MATTONA NIP. 19941129 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PENGURUS BARANG	
30	I WAYAN YULIUS PINTA RAHMAT, SE NIP. 19850718 202012 1 002	PENATA MUDA TK. I III/b	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENGURUS BARANG	
31	FERDINAND DUWITAU NIP. 19921228 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Sugapa	PENGURUS BARANG	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
32	TITUS BAGUBAU, A.Md,Sos NIP. 19770712 201505 1 001	PENATA MUDA III/a	Distrik Homeyo	PENGURUS BARANG	
33	JEKI DUGUPA NIP. 19960106 202012 1 006	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Mbiandoga	PENGURUS BARANG	
34	MARINUS BAGAU NIP. 19900409 201104 1 001	PENGATUR TK.I II/d	Distrik Agisiga	PENGURUS BARANG	
35	MERKIAS TIPAGAU NIP. 19830506 201505 1 002	PENGATUR II/c	Distrik Hitadipa	PENGURUS BARANG	
36	MOSA ZAGANI NIP. 19880214 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Wandai	PENGURUS BARANG	
37	ANIUS HIPIZAU NIP. 19960616 202012 1 005	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Tomosiga	PENGURUS BARANG	
38	YOHANA FRANSISKA TIPAGAU NIP. 19870116 202012 2 002	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Ugimba	PENGURUS BARANG	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
 NOMOR : 000.2.1-23 TAHUN 2026
 TANGGAL : 13 Februari 2026
 TENTANG : Penunjukkan Pengurus Barang Pengguna
 pada Perangkat Daerah dan Pengurus Barang
 Pembantu pada Unit Palaksana Teknis
 Daerah Di Lingkungan Pemerintahan
 Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	MUCHAMMAD FAISAL ASRILLAH, S.Farm NIP. 19950624 202012 1 005	PENATA MUDA TK. I III/b	Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya	PENGURUS BARANG PEMBANTU	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

